

**PENGARUH FAKTOR POLITIK, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris atas SKPD Pemerintah Kota Padang)**

Deddi fardian

Fakultas Ekonomi Akuntansi
Universitas Negeri Padang

In Indonesia, studies on implementation of transparency of financial reporting are still very few and limited. Based on a survey conducted in city government of padang, the purpose of this study is to explore a conceptual model developed to explain the relationship between political factor, environmental uncertainty, competence of human resources and transparency of financial reporting. Theoretical development and interpretation of this research is drawn from institutional theory. The samples of this study consist of 16 SKPD that have departement format in city government of padang. This study uses qualitative. Partial Least Square (PLS) was used to analyze the proposed model and relationships. Content analysis was used to capture the phenomenon of isomorphism that occurred in implementation of the transparency of financial reporting. This study provides evidence that the implementation of transparency of financial reporting in city government of padang is influenced by political factor, environmental uncertainty and management commitment. The major contribution of this research is to provide an understanding of the factors that affect the application of the transparency of financial reporting, which in turn could be used to formulate government policy in the future

1. PENDAHULUAN

Pada masa otonomi daerah sekarang ini, pengelolaan keuangan negara merupakan hal yang sangat wajib di transparansikan. Otonomi daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Isu yang paling penting dalam pemerintahan yaitu bagaimana membentuk sebuah organisasi pemerintahan yang dikelola dengan baik (*good governance*). Untuk mencapai suatu pengelolaan pemerintahan yang baik terutama dalam bagian keuangan, dibutuhkan sebuah transparansi laporan keuangan dalam pengelolaannya. Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku

kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007). Masyarakat memiliki hak dasar untuk tahu (*basic right to know*) dan memperoleh informasi mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah, dan mengapa suatu kebijakan atau program dilakukan serta bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya

transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada tahun 2012, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu dengan CPI (*Corruption Perceptions Index*) sebesar 3,0 (dengan kisaran 0-10) (Transparency.org). Hal ini dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di Indonesia masih sangat rendah

Pelaksanaan laporan keuangan yang transparan adalah dorongan yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bias di tawar-tawar. Hal ini bertujuan untuk

antara organisasi dengan stakeholders, maka penerapan transparansi pelaporan keuangan akan di pengaruhi oleh faktor-faktor dalam teori institusional yaitu dapat berupa factor politik, tekanan eksternal, jumlah anggaran, ketidakpastian lingkungan, komitmen management dan kompetensi sumber daya manusia (DiMaggio dan Powell, 1983 dalam M.Ridha 2012). M. Ridha dan Basuki (2012) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan di daerah DI. Yogyakarta. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen management terhadap transparansi laporan keuangan yang merupakan bentuk penerapan teori intitusional dalam fenomena institusional isomorfisme. Jadi berdasarkan penilitan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena

mewujudkan konsep reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governace*) yang dimana konsep tersebut sudah diwadahi dalam ketiga paket undang-undang reformasi keuangan serta peraturan-peraturan dibawahnya. Namun upaya organisasi dalam mewujudkan transparansi sangat di pengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan para stakeholder, karena sudah merupakan kewajiban moral, sosial dan hukum dari organisasi (Freeman 1984 dalam M.Ridha 2012). Menurut teori intitusional (DiMaggio dan Powell, 1983 dalam M.Ridha 2012) organisasi akan merespon tekanan dan upaya dalam mendapatkan legitimasi tersebut ke dalam manajemen yang berbeda-beda. Karena adanya hubungan kepentingan

isomorfisme terjadi dan berpengaruh positif terhadap organisasi publik.

Maka berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Penerapan transparansi Pelaporan Keuangan SKPD yang berjudul **“Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana pengaruh Faktor Politik terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?

2. Sejauhmana pengaruh Ketidakpastian lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
3. Sejauhmana pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Faktor Politik terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
2. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Teori institusional (*Institutional Theory*) atau **teori kelembagaan** *core idea*-nya adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Zukler (1987) dalam Ridha (2012), menyatakan bahwa ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi.

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005)

Stiglitz (1999) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia. Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar (Hood, 2010). Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka tentang input, output, dan *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan *outcome*), transparansi *real-time* (informasi yang dirilis segera), atau transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut). Rawlins (2006) memberikan tambahan pada definisi yang diberikan oleh Heise (1985) dalam Rawlins (2008). Definisi transparansi secara operasional adalah sebagai berikut:

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya..

Indikator Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Indikator penilaian transparansi pelaporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan yang dirilis secara legal baik positif maupun negative, akurat, tepat waktu, seimbang dan tegas. Dan pencapaian kerja dari organisasi berupa *input*, *output*, *outcome* dan penyediaan akses *stakeholder* atas laporan keuangan (M.Ridha 2012)

Faktor Politik

Masalah politik dalam birokrasi negara (juga administrasi negara) terjadi pada tugas utama birokrasi-birokrasi negara. Tugas pengadministrasian tersebut sebelumnya telah digariskan lewat Undang-

undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang telah disusun baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun secara bersama.

Dalam proses menjalankan suatu kebijakan, birokrasi-birokrasi negara tidaklah steril dari lingkungan politik suatu negara. Berjalan atau stagnannya implementasi kebijakan negara oleh birokrasi-birokrasi negara sangat dipengaruhi lingkungan perpolitikan suatu negara. Pengaruh-pengaruh tersebut dalam berlangsung dari lingkup internal, eksternal, resmi, ataupun non resmi.

Indikator Faktor Politik

Indikator penilaian dari faktor politik yaitu ketergantungan pada pusat, ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan, tekanan dari pimpinan jabatan politik dan pemberitaan akan transparansi (Teo,*et al.* (2003) dan Ugrin (2009) dalam rudi usman 2012).

Ketidakpastian Lingkungan

Isomorfisme mimetik adalah kecenderungan organisasi untuk memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain (DiMaggio dan Powell, 1983) muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian (Mizruchi dan Fein, 1999) akan suatu standar tertentu. Isomorfisme mimetik termasuk di dalamnya *benchmarking* dan mengidentifikasi praktik terbaik yang ada di lapangan (Tuttle dan Dillard, 2007). Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya.

Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindarajan, 1984). Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan

mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi ke peraturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti, pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999)..

Indikator Ketidakpastian Lingkungan

Indikator penilaian dari ketidakpastian lingkungan yaitu persepsi terhadap keberhasilan peraturan dalam praktik penerapan transparansi, tingkat keberhasilan adopsi dari sitem atau peraturan dari organisasi sejenis dan menyediakan informasi keuangan baik positif maupun negative ((Teo,*et al.* (2003) dan Ugrin (2009) dalam rudi usman 2012).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

DiMaggio and Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme normatif terkait dengan profesionalisme. Profesionalisme merukan suatu hal yangterkait dengan Integritas dan kompetensi Sumber daya manusia di Organisasi itu sendiri. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu factor dalam penilaian profesionalisme.

Sumber daya manusia ada kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, prilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturnan dan lingkunganya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan asset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan Keterampilan yang dimiliki oleh oleh seseorang yang di tunjukan oleh kemampuanya untuk konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tingi salam suatu fungsi pekerjaan yang spesifik. Menurut Spencer dan Spencer (1993) Komeptensi merupakan karakteristik yang

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator penilaian kompetensi sumber daya manusia yaitu kompetensi di bidangnya, budaya etis dan komprehensif dan lain-lain (DiMaggio dan Powel, 1983 dalam M.Ridha 2012)

PENELITIAN TERDAHULU

- 1.M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan studi empiris D.I Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen management berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
- 2.Ruth Tria Enjelina (2013) meneliti tentang penerapan prinsip transparansi sebagai salah satu bentuk prinsip *good governance* pada PT semen Gresik. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa adanya hambatan-hambatan internal maupun eksternal dalam melakukan prinsip transparansi dalam penerapan pelaporan keuangan.
- 3.Rudi Usman (2012) meneliti tentang Pengaruh factor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut Mengemukakan Bahwa Adanya Pengaruh Dari Faktor Institusional terhadap Penerapan Sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah.

Hubungan Antar Variabel.

1. **Hubungan faktor politik dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan**

Teori institutional organisasi membentuk fenomena isomorfisme dalam bentuk koersiv, mimetic, normative. Isomorfisme koersiv merupakan fenomena yang terbentuk akibat adanya upaya sebuah organisasi dalam mencari legitimasi (Dimaggio dan Powell, 1983). Upaya organisasi dalam mencari legitimasi tidak bebas dari pengaruh faktor politik yang menguasai lingkungan dimana organisasi berada.

Faktor politik merupakan kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi. Faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam stuktur pemerintahan, faktor politik berperan dalam pembuatan sebuah regulasi dan aturan di dalam pemerintahan. Penerapan transparansi laporan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah system atau tata cara dalam menciptakan sebuah hasil. Sebuah system pasti diatur oleh regulasi, hukum maupun perda terkait. Faktor politik berperan dalam menekan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi pelaporan keuangan. Contohnya SAP 2010 basis akrual.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat dikatakan bahwa faktor Politik berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Jadi dapat dirumuskan konsep bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

2. Hubungan ketidakpastian lingkungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan

Fenomena isomorfisme mimetic terbentuk akibat upaya organisasi dalam memodelkan dirinya kepada organisasi lain yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan

Fein, 1999). Hal ini merupakan respon atau tanggapan dari sebuah organisasi akibat adanya suatu ketidakpastian lingkungan (Mizruchi dan Fein, 1999). Pemodelan ini dapat dalam bentuk penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian lingkungan yaitu suatu keadaan dimana organisasi tidak yakin dengan cara berproses atau melakukan sesuatu baik itu sistem ataupun peraturan terkait. Penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan sebuah sistem dalam menciptakan hasil laporan keuangan yang transparan yang merupakan tuntutan dari semua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ketidakpastian lingkungan menciptakan ketidakmengertian sebuah organisasi dalam melakukan sesuatu, dalam konteks ini bagaimana cara menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Organisasi akan merespon hal ini dengan cara meniru organisasi yang telah dianggap sukses dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Contohnya dengan cara melakukan studi banding atau memakai jasa konsultan dari organisasi yang telah dianggap berhasil tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian lingkungan. Untuk itu, dapat dirumuskan bahwa Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

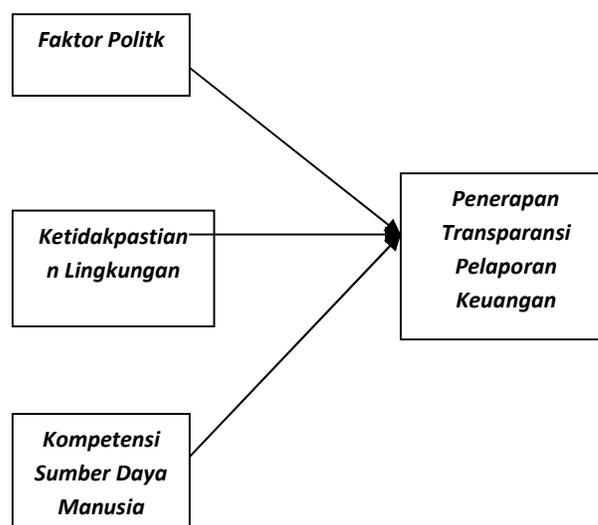
3. Hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Fenomena Isomorfisme Normative terbentuk karena adanya tuntutan dari stakeholders terhadap organisasi yang dilakukan dengan profesionalitas DiMaggi and Powel(1983). Profesionalitas merupakan bentuk dari adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia di dalam sebuah organisasi, jadi dapat di katan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan bentuk

dari Profesionalitas dalam sebuah organisasi.

Transparansi Laporan Keuangan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sebuah tuntutan terhadap organisasi publik karena digunakan oleh para *stakeholders* dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan merupakan output organisasi yang dihasilkan oleh perangkat dalam organisasi tersebut melalui sebuah sistem yang telah diatur. Dalam sebuah sistem, sumber daya manusia adalah perangkat dalam menjalankan sistem tersebut yang menentukan hasil yang didapat dari sistem tersebut. Kompetensi sumber daya manusia adalah perangkat dalam menjalankan organisasi public dalam ini kompetensi sumber daya manusia merupakan perangkat dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan organisasi public. Penerapan transparansi pelaporan keuangan yang tinggi sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

KERANGKA KONSEPTUAL



4. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Padang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampel berdasarkan kriteria*. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas yang ada di pemerintah Kota Padang, SKPD yang berbentuk dinas di pemerintah Kota Padang terdiri dari 16 dinas. SKPD berbentuk Dinas merupakan SKPD yang seluruh kebijakannya terkait oleh Pimpinan daerah/kota atau provinsi setempat dapat dikatakan komandonya berada dibawah Pemda/Pemko atau Pemprov setempat, sedangkan SKPD berbentuk Badan merupakan SKPD yang perintah komandonya oleh Kementrian atau Lembaga Pusat terkait, sehingga tidak dipengaruhi oleh pimpinan daerah/kota atau provinsi setempat. Karena itu berdasarkan variabel yang diteliti SKPD berbentuk dinas dianggap lebih tepat untuk dijadikan sampel. Terdapat 16 dinas di Pemerintah Kota Padang.

3. Responden

Responden penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan karena bagian tersebut terlibat langsung dan bertanggung jawab penuh dalam menyusun anggaran, sehingga responden berjumlah 80 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data subjek. **Sumber Data** penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner diantarkan langsung ke alamat responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh pimpinan SKPD Pemerintah Kota Padang.

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen (*variabel bebas*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Faktor Politik (X1), Ketidakpastian Lingkungan (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Sangat setuju (SS), setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*). Uji validitas dilakukan dengan

menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa S2 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, jika nilai *asym.sig (2-tailed) > 0.05* maka distribusi data dikatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF) < 10* dan *tolerance > 0.1* maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

1. Metode Analisis

a. Analisis Regresi Berganda

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel

dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang

A = Konstanta

b_{1,2} = Koefisien Regresi Dari Variabel Independen

X₁ = Faktor Politik

X₂ = Ketidakpastian Lingkungan

X₃ = Kompetensi Sumber Daya manusia

e = error term

b. Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikan pada level $\alpha = 0,05$. Apakah nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikan maka model yang digunakan sudah fix.

c. Koefisien Derteminasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien derteminasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* bearti *R Square* suatu disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang bercukupan dengan perhitungan *Adjusted R Square* nilai koefisien derteminasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil baerti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

d. Uji hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap

variabel terkaitnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi. Rumus yang digunakan :

$$t - \text{test} = \frac{\beta t}{S\beta t}$$

dimana:

B = koefisien regresi

S β t = standar error atas koefisien regresi variabel

Ketentuan penerimaan hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

- a) Jika t hitung > t table, atau tingkat signifikan < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis di terima.
- b) Jika t hitung > t tabel, atau signifikan < $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis di tolak.
- c) Jika t hitung < t tabel, maka tingkat signifikan > $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak.

DEFENISI OPERASIONAL

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka perlu menjelaskan defenisi operasional variabel berikut:

1. Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Silver (2005) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang dirilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya. Transparansi pelaporan keuangan dalam penelitian ini adalah terkait semua upaya SKPD yang secara sengaja melaporkan semua informasi keuangan yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif, akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab SKPD atas tindakan, kebijakan, dan praktik yang dilakukannya.

2. Faktor Politik

Factor politik dalam hal ini adalah kondisi dimana SKPD mengalami tekanan eksternal dari kekuatan politik yang menguasai pada periode tersebut dimana kekuatan politik dapat mengatur regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya pengaruh dari factor politik dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yanghanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini di tujukan kusus pada penerapan transparansi laporan keuangan.

3. Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak *match*-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini terkait dengan kemampuan, intelijen dan profesionalitas sumber daya manusia di SKPD dalam menerapkan Penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dalam hal ini Transparansi Pelaporan keuangan dapat di capai apabila SKPD memiliki Sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbentuk

Dinas di Kota Padang. Setiap sampel memiliki 5 responden jadi jumlah sampel dari penelitian ini adalah 80 responden. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 80 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah adalah 80 kuesioner.

Demografi Responden

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 71,25% atau sebanyak 57 orang, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebesar 28,75% atau sebanyak 23 orang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 7 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah pada tingkat Strata 1 (S1) sebesar 68,75% atau sebanyak 55 orang, pada tingkat Diploma 3 (D3) sebesar 13,75% atau sebanyak 11 orang, pada tingkat strata 2 (S2) sebesar 17,5% atau sebanyak 14 orang dan tidak satupun responden berlatar belakang pendidikan Strata 3 (S3). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan formal yang ditempuh responden berpendidikan paling banyak pada Strata 1.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Kompetensi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 8 di atas terlihat bahwa latar belakang pendidikan responden dengan persentase terbesar adalah pada jurusan akuntansi sebesar 38,75% atau sebanyak 31 orang. Selanjutnya pada jurusan manajemen sebesar 12,5% atau sebanyak 10 orang, pada jurusan hukum sebesar 31,25% atau sebanyak 25 orang, pada jurusan teknik sebesar 7,5% atau sebanyak 6 orang. Selanjutnya dari jurusan lain-lain sebesar 10% atau sebanyak 8 orang

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berkerja

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat bahwa masa kerja responden dengan persentase terbesar adalah dalam rentang >10 tahun yaitu sebesar 62,5% atau sebanyak 50 orang. Selanjutnya diikuti masa kerja rentang 5-10 tahun sebesar 27,5% atau sebanyak 22 orang, sedangkan rentang 1-5 tahun sebesar 10% atau sebanyak 8 orang

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 10 di atas dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Pada variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 19,9375 dengan standar deviasi 4,11340 nilai maximum sebesar 25, nilai minimum sebesar 15. Variabel X_2 diketahui nilai mean 16,8500 dengan standar deviasi 2,42404 nilai maximum 20, nilai minimum sebesar 12. Untuk variabel X_3 diketahui nilai mean 19,675 dengan standar deviasi 2,71071 nilai maximum 25, nilai minimum sebesar 15. Pada variabel Y dengan nilai mean 21,9750 dengan standar deviasi 2,02500 yang nilai maximum 25, nilai minimum sebesar 19.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Dari Tabel di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Instrumen factor politik nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,868, instrumen ketidakpastian lingkungan nilai terkecil 0,639, instrumen kompetensi sumber daya manusia nilai terkecil 0,510 dan untuk penerapan transparansi pelaporan keuangan dengan nilai terkecil sebesar 0,252.

2. Uji Reliabilitas

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen factor politik 0,965, instrumen ketidakpastian lingkungan 0,829, instrumen kompetensi sumber daya manusia 0,807 dan

untuk instrumen penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD 0,614. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,5(moderat) dan 0,8 (tinggi) sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* sebesar 0,861, dengan signifikan 0,448. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 18 diatas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

C. Analisa Data

1. Uji Koefisien Determinasi

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,729. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu factor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah sebesar 72,9%, sedangkan 27,1% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Persamaan Regresi

Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 7,192 + 0,214(X_1) + 0,440(X_2) + 0,156(X_3)$$

Dimana:

X_1 = Faktor Politik

X_2 = Ketidakpastian Lingkungan

X_3 = Kompetensi Sumber Daya manusia

Y = Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

a. Uji F (*F-Test*)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model tetap dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan antara nilai sig dan $\alpha = 0,05$. Nilai F_{tabel} untuk $n = 80$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,72 Nilai F_{hitung} adalah 71,718 sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai sig $< \alpha 0,05$.

3. Uji t (*t-test*)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat

bebas (db) = $n-k-1 = 80-4-1 = 75$ adalah 1,983.

a. Factor politik (X_1) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} 6,084 > t_{tabel} 1,66543$ dan nilai signifikan sebesar $0,00 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,214. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa factor politik (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD.

b. Ketidakpastian lingkungan (X_2) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD (Y)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} 7,447 > t_{tabel} 1,66543$ dan nilai signifikan sebesar $0,00 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,440. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan ketidakpastian lingkungan (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD.

c. Kompetensi sumber daya manusia (X_3) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa

nilai $t_{hitung} 3,525 > t_{tabel} 1,66543$ dan nilai signifikan sebesar $0,01 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,156. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kompetensi sumber daya manusia (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pengaruh faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD terjadi gejala *isomorfisme koersif* dalam SKPD. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat perangkat daerah kota padang sudah memahami pentingnya pemberitaan akan transparansi laporan keuangan untuk memenuhi tuntutan stakeholders dan sudah terciptanya peraturan, adanya kritik dari masyarakat terhadap tuntutan penerapan transparansi pelaporan keuangan dan tuntutan dari kepala daerah dan anggota dewan untuk menciptakan transparansi pelaporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh di magio dan powel (2002) yaitu Upaya organisasi dalam mencari legitimasi tidak bebas dari pengaruh faktor politik yang menguasai lingkungan dimana organisasi berada. Isomorfisme koersif

selalu terkait dengan segala hal yang terhubung dengan lingkungan di sekitar organisasi. Isomorfisme koersif (*coercive isomorphism*) merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya (DiMaggio dan Powell, 1983) dan DiMaggio dan Powell (1983) juga menyatakan bahwa isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi. Jadi upaya dalam menciptakan transparansi pelaporan keuangan oleh organisasi publik sangat terikat dengan faktor politik di daerah organisasi publik tersebut berada. Hal ini menegaskan pentingnya peran faktor politik dalam menciptakan organisasi publik baik, karena dapat mendorong terciptanya sebuah penerapan transparansi pelaporan keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa faktor politik berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. M. Arsyadi Ridha dan Harjo Basuki (2012) meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan studi empiris D.I Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen management berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terjadi fenomena isomorfisme koersif di dalam organisasi publik.

2. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi

pelaporan keuangan SKPD terjadi gejala *isomorfisme mimetic* dalam SKPD. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan akan meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell, 1983 dalam M. Ridha 2012, bahwa Fenomena isomorfisme mimetic terbentuk akibat upaya organisasi dalam memodelkan dirinya kepada organisasi lain yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999). Hal ini merupakan respon atau tanggapan dari sebuah organisasi akibat adanya suatu ketidakpastian lingkungan (Mizruchi dan Fein, 1999). Pemodelan ini dapat dalam bentuk penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD. M. Arsyadi Ridha dan Harjo Basuki (2012) meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan studi empiris D.I Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen management berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Rudi Usman (2012) meneliti tentang Pengaruh faktor Institusional Terhadap Minat Adopsi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa Adanya Pengaruh Dari Faktor Institusional terhadap Penerapan Sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah.. Hasil

penelitian menyatakan terjadi gejala isomorfisme mimetic organisasi karena adanya ketidakpastian lingkungan yang mempengaruhi minat adopsi sia organisasi public dengan meniru organisasi lain yang sejenis.

Ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah daerah kota padang menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan meniru organisasi publik lain yang telah berhasil dalam menerapkan transparansi laporan keuangan baik dalam daerah, luar daerah maupun internasional, telah menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan skpd berada, memperbaiki legitimasi dan menyampaikan informasi keuangan yang berdampak positif dan negative bagi SKPD

3. Kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD terjadi *isomorfisme normative* dalam organisasi publik. Hal ini memperlihatkan bahwa aparat perangkat daerah di kota padang sudah memilik pemahaman tentang akuntansi dalam menerapkan proses transparansi pelaporan keuangan, sudah memiliki sumber daya yang memadai, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam SKPD, diberikanya pelatihan untuk mendukung penerapan transparansi pelaporan keuangan dan diberikanya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal SKPD untuk menghadapi perubahan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh DiMaggio dan Powell, 1983 dalam M.Ridha 2012 bahwa Fenomena Isomorfisme Normative terbentuk karena adanya tuntutan dari stakeholders terhadap

organisasi yang dilakukan dengan profesionalitas DiMaggi and Powel(1983). Profesionalitas merupakan bentuk dari adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia di dalam sebuah organisasi, pada peningkatan kinerja. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan terjadinya isomorfisme normative dalam organisasi publik. M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) meneliti tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan studi empiris D.I Yogyakarta . Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen management berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. jadi organisasi public akan menuntut terciptanya penerapan transparansi pelaporan keuangan karena adanya factor normative dalam organsisasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh faktor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan “ adalah sebagai berikut:

1. Factor politik berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kota Padang
2. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kota Padang
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD Kota Padang

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih

terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukannya hanya pada satu wilayah di Sumatera Barat, yaitu SKPD yang ada di kota padang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
2. Sampel dari penelitian ini berdasarkan kriteria yaitu hanya SKPD berbentuk dinas karena keterbatasan waktu penelitian sehingga hasil ini belum bisa digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan
3. Penelitian ini kurang mengeksplorasi faktor-faktor maupun indikator lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan dalam konteks isomorfisme
4. rancangan instrumen penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dalam menangkap fenomena isomorfisme yang terkait dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya mungkin bisa mengevaluasi dan memperbaiki instrumen

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa Hasilnya adalah bahwa

1. factor politik, ketidakpastian lingkungan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan dan memperbaiki penerapan transparansi pelaporan keuangan di organisasi yang ada di lingkungan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan dan memformulasikan faktor-faktor tersebut dengan baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*.
- Frumkin, P. dan J. Galaskiewicz. 2004. Institutional Isomorphism and Public Sector Organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- M. Arsyadi Ridha, dan Hardo Basuki. 2012. Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen management terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *SNA Akuntansi 2012*
- Ruth Tria Enjelina . 2013. Pelaksanaan prinsip transparansi sebagai salah satu bentuk prinsip *Good Corporate Governace*. Artikel ilmiah universitas brawijaya 2013.
- Haga, Barrett lee. 2008 . Selected Public sector Organizational Paradigma and Organizational.
- Poole, Marshall Scott. 2004. Handbook of organizational Change and Inovation.
- B. Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, Fifth Edition (London : Routledge, 2001) pp.183-4
- Michael Klausner and Mary Ann Groves "Organizational Conflict" dalam Ali Farazmand, ed., Handbook of Bureaucracy (New York: Marcell Dekker, Inc., 1994 pp.355-70
- Gudono . 2009. Teori Organisasi

Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly*.

Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Versi Terjemahan). Penerbit Pustaka Pelajar.

Rudi usman. Pengaruh factor institusional terhadap minat adopsai sistim informasi akuntansi keuangan daerah. *Jurnal fakultas ekonomi brawijaya* 2012.

LAMPIRAN Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03459881
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		.861
Asymp. Sig. (2-tailed)		.448

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
penerapan transparansi pelaporan keuangan	21.9750	2.02500	80
faktor politik	19.9375	4.11340	80
ketidakpastian lingkungan	16.8500	2.42404	80
kompetensi sumber daya manusia	19.7625	2.71071	80

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	2.396	.625		3.836	.000
VAR00002	.069	.018	.448	3.861	.076
VAR00003	-.077	.030	-.296	-2.579	.062
VAR00004	-.084	.022	-.360	-3.734	.150

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Uji heterokedasitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	x1	.672	1.489
	x2	.685	1.459
	x3	.973	1.028

a. Dependent Variable: y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.192	1.239		5.802	.000
	x1	.214	.035	.435	6.084	.000
	x2	.440	.059	.527	7.447	.000
	x3	.156	.044	.209	3.525	.001

a. Dependent Variable: y

Koefisien regresi berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.729	1.05482

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	239.389	3	79.796	71.718	.000 ^a
Residual	84.561	76	1.113		
Total	323.950	79			

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

